



**KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR HEWAN TOLO'
KECAMATAN KELARA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Oleh :

13-12-2001
Fak. Peternakan
1 lls
Hadrah
0112013.231
16277

MUHAMMAD WALIYUDDIN ABDUH



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR HEWAN TOLO
KECAMATAN KELARA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN JENEPONTO**

OLEH :

MUHAMMAD WALIYUDDIN ABDUH

I 311 95 131

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Pada

Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2001

ABSTRAK

Muhammad Waliyuddin Abduh (I 311 95 131). Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto, dibawah bimbingan Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS sebagai pembimbing utama dan Ir. Syahriadi Kadir, MSi sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, mulai tanggal 2 Juni sampai 4 Agustus 2001 dengan tujuan untuk mengetahui nilai pencapaian retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi nilai pencapaian retribusi tersebut.

Data diperoleh dari Kantor Sub Dinas Peternakan berupa data populasi ternak dan mekanisme pemungutan retribusi, termasuk ketentuan pemungutan retribusi, Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa laporan realisasi dan target penerimaan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah, Kantor Dinas Statistik berupa data keadaan wilayah secara umum, dan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pencapaian penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' dilakukan wawancara terhadap pedagang sebagai responden sebanyak 30 orang atau sekitar 20% dari jumlah populasi.

Untuk mengetahui apakah pencapaian nilai retribusi sudah efektif atau belum digunakan analisa perbandingan antara nilai pencapaian retribusi pada Pasar Hewan Tolo' dengan target nilai retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Adapun kriteria yang digunakan, yaitu : efektif apabila realisasi nilai retribusi pada Pasar Hewan Tolo' mencapai 80% atau lebih terhadap target yang ditetapkan dan dikatakan belum efektif apabila realisasi nilai retribusi pada Pasar Hewan Tolo' kurang dari 80% dari target yang ditetapkan (Hasbullah, Dinas Pertanian dan Kehutanan). Sedangkan untuk mengetahui kontribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap total Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jeneponto dilakukan analisa perbandingan antara retribusi dari Pasar Hewan Tolo' dengan retribusi sub sektor lain. Adapun analisa mengenai hal-hal yang mempengaruhi pencapaian jumlah retribusi dibahas secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan berdasarkan rata-rata (mean) penerimaan retribusinya efektif. Sedangkan kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto menunjukkan nilai yang lebih besar dari rata-rata kontribusi sub sektor lain. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian penerimaan retribusi tersebut antara lain besar tarif retribusi yang dipungut, jumlah transaksi/ternak kuda yang terjual, hari pasar yang hanya sekali dalam seminggu, adanya transaksi selain di pasar hewan dan adanya transaksi yang tidak dilaporkan.

Judul : Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto

N a m a : Muhammad Waliyuddin Abduh

Stambuk : I 311 95 131

Jurusan : Sosial Ekonomi Peternakan

Skripsi Ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :



Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS
Pembimbing Utama



Ir. Syahriadi Kadir, MSi
Pembimbing Anggota

Diketahui Oleh :



Prof. DR. Ir. MS. Effendi Abustam, MSc
D e k a n



Ir. Muhammad Djufri Palli
Ketua Jurusan

Tanggal Lulus : 27 Agustus 2001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Bantuan dan motivasi dari berbagai pihak merupakan sumbangan yang sangat bernilai baik selama studi maupun dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS sebagai pembimbing utama dan Bapak Ir. Syahriadi Kadir, MSi sebagai pembimbing anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ir. Tanrigiling Rasyid, Ms, selaku Penasehat Akademik, dan Bapak Ir. Sofyan Nurdin Kasim, MS yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, serta sumbangan pemikiran selama penulis melaksanakan studi penulis.
3. Bapak Dekan Fakultas Peternakan Prof. DR. Ir. M.S. Effendy Abustam, MSc, Bapak Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Ir. Muh. Djufri Palli dan Bapak/Ibu Dosen terutama Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu pengetahuan dan bimbingannya.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, terkhusus kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah beserta Staf, Kepala Kantor Sub Dinas Peternakan beserta staf terutama Bapak H. Jumran dan Bapak Hasbullah, dan Kepala Kantor Statistik beserta staf.
5. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drs. Muhammad Abduh (Alm) dan Ibunda Siti. Aminah atas restu yang senantiasa meliputi kehidupan saya.
6. Saudara-saudara saya, Ir. Wahyuddin A, dr. Sri Wartati, Muh. Warkah SSos Sri Wardha Satriani SKM, Muh. Warham SAg, dan Uwais Qarni atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan.
7. Para Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa terutama kepada Angkatan 95 dan anggota KO-DM : Nurdin, Memet, Bambang, Iful, Darman, Sahir, Rudi, Ridho, Buca', Irma, Ima, Irvan, Didin, Metal, Wahda, Emil, Tatte', Ani, Lia, Hexa, Uti dan Susi. Juga kepada Kak Naga (93), Hasna, Ani, Wahid, Nikma (96); Awal, Ale, Harud, Adi, Igo, Imman (97); Dhail, Goku, Bob, Kiki, Isti, Ana, Tya, Cupi, Arni dan seluruh anggota Pass 180; Rifad, Fandi, Dayat, Pai (99); Sudirman (00), Anak ACOX (Pulunk, Matel, Ian, Adi, Iwan, Awal, Ulla, dkk) karena kebersamaan dengan kalian menjadikan hidup lebih berwarna serta terima kasih atas bantuan dan motivasinya.
8. Keluarga M. Sinjata di Jeneponto, atas dukungan akomodasi selama penelitian ini dilaksanakan.
9. Terkhusus kepada Haslinda MT: "perhatian, pengertian, dan kesabaranmu" adalah karunia terindah yang pernah kumiliki.



10. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya demi kelengkapan skripsi ini, penulis membuka tangan atas setiap masukan dari pembaca.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Muhammad Waliyuddin Abduh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Hipotesa	4
Tujuan Penelitian	4
Kegunaan Penelitian	5
TINJAUAN PUSTAKA	
Peternakan Secara Umum	6
Keuangan Pemerintah Daerah	8
Retribusi	12
Pasar Hewan	14
METODE PENELITIAN	
Waktu dan Tempat	17
Metode Penelitian	17
Jenis dan Sumber Data	17
Analisa Data	18
Konsep Operasional	19

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Letak Geografis dan Topografis	20
Pola Pemanfaatan Lahan	21
Keadaan Penduduk	22
Mata Pencaharian	23
Keadaan Pertanian dan Peternakan	25
Pasar Hewan Tolo'	27

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Responden :

A. Umur Responden	30
B. Tingkat Pendidikan	31
C. Pengalaman Berdagang Ternak	32
Retribusi Pasar Hewan Tolo'	33
Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Hewan Tolo'	36
Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto	38
Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto	39
Hal-Hal Yang Mempengaruhi Nilai Pencapaian Retribusi Pasar Hewan Tolo'	41

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	46
Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto	: 20
2.	Luas Tanah di Kabupaten Jeneponto Menurut Jenisnya Penggunaannya	: 22
3.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Jeneponto	: 23
4.	Distribusi Penduduk Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Mata Pencarian	: 24
5.	Luas Panen, Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenisnya di Kabupaten Jeneponto	: 25
6.	Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Jeneponto Menurut Jenisnya	: 26
7.	Populasi Unggas di Kabupaten Jeneponto Menurut Jenisnya	: 27
8.	Klasifikasi Umur Responden di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto	: 30
9.	Identifikasi Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto	: 31
10.	Identifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman Berdagang Ternak di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto	: 32
11.	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara Tahun 1996/1997 Sampai Dengan Tahun 2000	: 36
12.	Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 1996/1997 - Tahun 2000	: 38

13. Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' dan Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah Sub Sektor Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto Tahun 1996/1997 - Tahun 2000 : 40
14. Hal-hal Yang Mempengaruhi Nilai Pencapaian Retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara : 45

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Identitas Responden di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto	: 48
2.	Data Primer Pedagang Ternak di Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara	: 49
3.	Perhitungan Kontribusi Pasar Hewan Tolo' Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto	: 51
4.	Perhitungan Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' dan Retribusi Daerah sub Sektor Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto	: 55

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah pusat untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah karena kegiatan ekonomi akan terpusat pada daerah-daerah tertentu, sedangkan daerah-daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Bagi suatu negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasaan antar daerah, dan akan mengarah pada ketidakstabilan politik bagi negara. Dan dalam jangka panjang akan merugikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang terjadi di Indonesia.

Sejak reformasi digulirkan terutama dalam pemerintahan, maka semangat untuk mewujudkan otonomi daerah yang sebenarnya, dirasakan sebagai solusi untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan kewenangan pemerintah daerah dapat diperluas/ditingkatkan dan pemerintah daerah dapat bertanggung jawab dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Kaho, 2001). Berdasarkan asumsi tersebut, semua daerah kabupaten harus mampu meningkatkan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Sebagaimana daerah lainnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas kemasyarakatan didasarkan pada Pasal 79 Undang- Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Undang-undang ini dianggap penting bagi pengembangan pertanian secara umum, khususnya bidang peternakan, dimana kewenangan yang selama ini ditangani oleh pusat beralih menjadi kewenangan daerah otonomi kabupaten/kota.

Dari sisi ekonomi meskipun peranan peternakan terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nasional masih kecil, yaitu sekitar 3 %, namun memiliki nilai strategis dalam menyediakan pangan bergizi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan penerapan otonomi daerah, maka usaha peternakan akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting (Sutawi, 2000). Bagi Pemerintah Daerah pungutan-pungutan semacam retribusi sangat diperlukan mengingat setelah otonomi daerah diberlakukan Pemerintah Daerah tidak lagi mendapatkan dana dari pusat untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintahan maupun pembangunan di wilayah kerjanya, tetapi jika kebijakan pungutan dilakukan dengan tidak bijaksana maka dikhawatirkan pengusaha tidak akan menanamkan modalnya kedaerah tersebut.

Untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah setempat seperti yang berhubungan dengan sub sektor peternakan antara lain pajak potong hewan, retribusi pemeriksaan hewan, maupun retribusi pasar hewan.

Untuk retribusi pasar hewan bersumber dari sejumlah hewan atau ternak kuda yang diperdagangkan oleh pedagang dalam Pasar Hewan Tolo' yang dikenakan retribusi, retribusi ini dipungut atas pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilihat seberapa besar kontribusi retribusi pada Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- Apakah pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto dari retribusi pada pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara sudah efektif atau belum.
- Hal-hal apa yang mempengaruhi pencapaian nilai retribusi pada Pasar Hewan Tolo'.

Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

- Diduga bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pada pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara belum efektif.

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui nilai pencapaian retribusi Pada Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Untuk mengetahui hal-hal apa mempengaruhi nilai pencapaian retribusi pada Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang Kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto adalah sebagai masukan atau bahan informasi bagi pihak yang berwenang dalam mengambil langkah kebijaksanaan dalam hal pemungutan retribusi Pasar Hewan Tolo' di Kabupaten Jeneponto dikaitkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TINJAUAN PUSTAKA



Peternakan Secara Umum

Setiap hewan dapat dipelihara untuk diambil manfaatnya sesuai keinginan, untuk hobi atau sekedar mengisi waktu luang, selanjutnya pemelihara harus memperbanyak hewan kegemarannya dan harus beralih dari kegemaran menjadi suatu usaha. Memperbanyak hewan harus pula memperbanyak kemampuan dan berusaha agar manfaat dari hewan itu benar-benar dirasakan oleh orang lain, dan bila pada tindakan ini manusia sampailah pada suatu "peternakan", artinya mengelola manfaat yang akan dijual untuk orang lain sekaligus pemiliknya memperoleh manfaat ganda (Rasyaf, 1996).

Pemeliharaan ternak sistem tradisional skala usahanya kecil dari segi jumlah ternak, walaupun sistem penggembalaan ternak tradisional ditempat-tempat yang luas dapat memiliki jumlah yang cukup besar. Jumlah ternak yang menopang keluarga jarang yang memenuhi kebutuhan subsistensi. Sistem tradisional ini mempergunakan tenaga kerja yang tidak dibayar dan keputusan pemilik usaha berpengaruh. Pemeliharaan dilakukan dekat dengan hijauan, karena usahanya skala kecil, maka hanya memasarkan beberapa ekor ternak saja dan menjual sewaktu-waktu saja atau tidak sama sekali (Hardjosworo dan Levine, 1987).

Arisman, dkk (1982) menyatakan, bahwa usaha pemeliharaan ternak itu dinamakan usaha peternakan. Dari usaha Peternakan itu manusia dapat menikmati hasil-hasilnya. Selain tenaganya, hewan ternak dapat memberikan hasil berupa bahan pangan, pakaian, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, usaha peternakan harus terus dikembangkan agar hasil-hasilnya terus menerus dapat memenuhi kebutuhan.

Memajukan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil peternakan dan memperluas lapangan kerja serta memanfaatkan potensi dan hasil kekayaan alam.

Tekanan pada penggunaan prinsip-prinsip bisnis akan memaksa peternak secara sadar ataupun tidak untuk bertindak efisien dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola sumber daya yang telah dikombinasikan secara optimal, sebab segala sumber daya yang dimiliki seperti tanah untuk beternak, modal, tenaga kerja, ilmu pengetahuan serba terbatas. Sementara ia harus hidup dari peternakannya, jadi suatu peternakan tidak ada kaitannya dengan besar atau kecilnya jumlah ternak yang dipelihara, tetapi sejauh mana peternak menerapkan prinsip-prinsip bisnis berlandaskan teknis peternakan yang benar (Rasyaf, 1994).

Peternakan yang berorientasi bisnis akan menekankan penggunaan sumber daya seefisien mungkin. Ini bukan berarti penggunaan sumber sekecil-kecilnya untuk hasil yang sebesar-besarnya. Prinsip ini tidak berlaku untuk bisnis dan teknis peternakan. Disinilah letak perbedaan antara usaha peternakan dan beternak sekedar memelihara, sebab semua biaya yang telah dikeluarkan harus kembali bahkan harus menghasilkan lebih banyak dibanding biaya yang sudah dikeluarkan (Rasyaf, 1997).

Anonim (1993) menyatakan, bahwa berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, maka usaha tani ternak dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok sebagai berikut :

- a. *Peternakan sebagai usaha sampingan*, dimana petani mengusahakan berbagai macam komoditi pertanian terutama tanaman pangan, dengan tingkat pendapatan dari ternak kurang dari 30 %.

- b. *Peternakan sebagai cabang usaha*, petani peternak mengusahakan pertanian campuran (*mixed farming*) dan salah satu cabang usahanya adalah peternakan dengan tingkat pendapatan dari usaha ternak 30% - 70%.
- c. *Peternakan sebagai usaha pokok*, peternak mengusahakan seluruh usaha taninya pada bidang peternakan (*single commodity*), dengan pendapatan dari ternak 70% - 100%.
- d. *Peternakan sebagai usaha industri*, peternak mengusahakan komoditas ternak secara khusus (*specialized farming*), dengan tingkat pendapatan mencapai 100%.

Keuangan Pemerintah Daerah

Kaho (2001) menerangkan, bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Widjaja (1998) menyatakan, bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak

reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Apabila dalam Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hal yang kurang berhasil perlu dipacu kesadaran dan peran serta masyarakat, utamanya wajib pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pusat berupa subsidi/bantuan, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan agar dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 1997).

Pada pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumber pendapatan Daerah, adalah :

a. Pendapatan Asli daerah sendiri terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain usaha daerah yang sah

b. Pendapatan yang berasal dari pemerintah yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan azas-azas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD (Supriatna, 1996).

Lains (1985) menerangkan, bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu :

- Pertama ; Daerah dapat mengumpulkan pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
- Kedua ; pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah pusat.
- Ketiga ; ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak pusat yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan pusat tersebut.
- Keempat ; Pemerintah Daerah dapat menamabah tarif pajak pusat teretentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
- Kelima ; Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Soedargo (1994) menyatakan, bahwa agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan yang diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah tingkat I dan II mengutip bayaran yang disediakan. Bagi Dati II pungutan merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hampir menjadi setengah dari seluruh pendapatan daerah. Sebagian besar Pendapatan ini digolongkan kedalam pungutan (retribusi) tetapi jumlah yang cukup besar juga dicatat dibawah penerimaan dari Dinas (Devas, 1989). Selanjutnya dikatakan bahwa Dinas pendapatan Daerah di tiap-tiap daerah bertanggung jawab atas semua penerimaan daerah, meski banyak dari penerimaan ini sesungguhnya dipungut oleh kantor dan lembaga lain.

Anonim (2000), bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber asli pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Waluyo, 1997)

Widjaja (1998) menyatakan, bahwa retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung (*Cost Recovery*) dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai dengan besarnya retribusi yang ditarik. Dalam kondisi sekarang ini sumber penerimaan yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi terutama di Daerah Tingkat II. Retribusi daerah penerimaan pelayanan langsung suatu pemerintah Daerah bisa terpaksa dicabut karena suatu kebijaksanaan pemerintah pusat untuk mendorong perekonomian nasional. Pemerintah Daerah jangan menuntut kompensasi apapun bila pemerintah mencabut sesuatu pungutan daerah dalam rangka kepentingan nasional. Pengalihan retribusi dapat menghambat otonomi daerah, pencabutan beberapa retribusi akan menyulitkan terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya dikatakan bahwa Retribusi pasar dan kalangan, galian pasir dan kerikil serta lain dan sejenisnya tidak seberapa hasilnya.

Kaho (2001) menyatakan, bahwa ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang dapat langsung ditunjuk.

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Retribusi adalah pungutan daerah bagi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Waluyo, 1997). Selanjutnya dikatakan bahwa obyek retribusi terdiri atas (1) Jasa umum, (2) Jasa usaha, (3) Perizinan tertentu. Sedangkan menurut penggolongannya (a) retribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha, (c) retribusi perizinan tertentu.

Retribusi berbeda dengan pajak. Retribusi adalah pungutan sejumlah uang kepada pemerintah atas jasa timbal balik secara langsung kepada seseorang atau badan, sedangkan pajak merupakan pungutan juga tetapi tidak menerima jasa timbal balik secara langsung (Salamun, 1994).

Davey (1988) menyatakan, bahwa pungutan retribusi biasanya dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan pada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa.
- b. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka, mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat
- c. Mungkin ada bermacam-macam variasi dalam konsumsi individu, yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih dari pada memerlukan

d. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu di dalam negeri.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengenaan retribusi didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Retribusi di Bawah Biaya yaitu retribusi dibawah tingkat *full cost* dan subsidi dari penerimaan umum.
2. Retribusi diatas biaya yang lebih didasrkan pada *recovering* dari pada *full cost* dari suatu pelayanan yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksud untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Adapun retribusi daerah adalah suatu pembayaran yang dilakukan di daerah karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan (Soedargo, 1994).

Pasar Hewan

Swastha dan Sukotjo (1988) menyatakan, bahwa seseorang yang membeli barang atau jasa akan terlibat dalam suatu transaksi pembelian. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan kejadian ini berlangsung di suatu tempat tertentu sehingga pasar dianggap sebagai suatu tempat. Jadi pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk dibelanjakan dan kemauan untuk membelanjakannya.

Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa ditawarkan untuk dijual dan kemudian terjadi pemindahan hak milik. Pasar dapat juga didefinisikan sebagai permintaan yang dapat

diajukan oleh sekelompok pembeli yang potensial untuk sebuah produk atau jasa. Selanjutnya dikatakan bahwa pasar mempunyai tiga unsur yaitu : (a) Orang yang mempunyai keinginan untuk dipuaskan, (b) Mempunyai uang untuk dibelanjakan, dan (c) Kemauan untuk membelanjakan (Stanton, 1997).

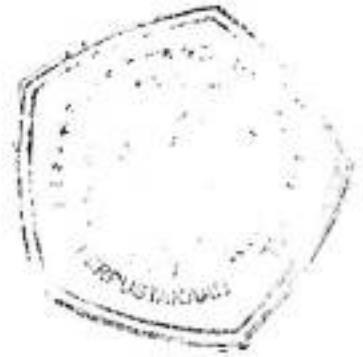
Pasar konkrit adalah tempat dimana peminta dan penawar barang berkumpul dan bertemu dengan ciri yaitu peserta pasar (penjual dan pembeli) dan barang yang diperdagangkan terdapat pada pasar tersebut. Pada pasar konkrit dapat diperdagangkan barang-barang konsumsi dan benda-benda modal. Pasar abstrak adalah seluruh daerah, dimana para peminta dan penawar mempunyai kontak demikian rupa sehingga harga-harga benda yang sama saling mempengaruhi satu terhadap lainnya secara langsung dan kuat (Hanafiah dan Saefuddin, 1986).

Rahardi, dkk (1996) menyatakan, bahwa pasar hewan adalah pasar yang menyediakan berbagai jenis ternak ruminansia (besar maupun kecil) yang masih hidup, disini para pembeli hewan memilih hewan yang diinginkan. Di pasar ini tidak disediakan pemotongan, biasanya ternak yang dibeli untuk dipotong sendiri. Bagi perusahaan peternakan yang tidak memiliki unit pengolahan, pasar ini layak sebagai sasaran pemasaran.

Di pasar hewan atau pada praktek sering kali ternak-ternak yang akan dibeli untuk tujuan-tujuan tertentu tidak atau hanya sedikit yang mempunyai catatan (recording) dan informasi tentang ternak yang akan dipilih. Oleh karena itu sangat sulitlah bagi orang (lebih-lebih belum berpengalaman memilih ternak sesuai dengan tujuan tertentu) untuk mendapatkan ternak seperti yang dikehendaki. Keadaan tersebut memaksa orang untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memberi

pertimbangan dalam menentukan sesuatu tipe dan kapasitas ternak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat. Dengan hasil pengalaman-pengalaman orang dalam menentukan kapasitas seekor ternak dalam waktu singkat walaupun informasi maupun recording ternak tersebut tidak dimiliki secara lengkap. Namun dengan menilai beberapa bagian organ dari tubuh tertentu dari luar (secara eksterior dan secara visual), maka ternak yang dikehendaki dapat ditemukan dengan hanya memerlukan waktu yang sangat singkat saja (Soenarjo, 1988).

METODE PENELITIAN



Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 2 Juni 2001 sampai dengan 4 Agustus 2001, bertempat di Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode studi kasus (*case study*) dengan pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*), dimana setiap pedagang mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan responden. Jumlah sampel adalah 30 orang atau 20 % dari jumlah pedagang sekitar 150 orang.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung, meliputi :

- Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang yang menjual ternaknya dan petugas pemungut retribusi pada Pasar Hewan Tolo'.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Sub Dinas Peternakan, dan Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto.

Analisa Data

- Untuk mengetahui apakah pencapaian nilai retribusi sudah efektif atau belum digunakan analisa perbandingan antara nilai pencapaian retribusi pada Pasar Hewan Tolo' dengan target nilai retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Adapun kriteria yang digunakan, yaitu : efektif apabila realisasi nilai retribusi pada Pasar Hewan Tolo' mencapai 80% atau lebih terhadap target yang ditetapkan dan dikatakan belum efektif apabila realisasi nilai retribusi pada Pasar Hewan Tolo' kurang dari 80% dari target yang ditetapkan (Hasbullah, Dinas Pertanian dan Kehutanan).
- Untuk mengetahui kontribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Pada Pasar Hewan Tolo'}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \text{ (Supranto, 1983)}$$

Untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto, maka nilai yang diperoleh dibandingkan dengan sumbangan dari sektor lain :

- Kontribusinya besar jika nilainya berada diatas nilai rata-rata kontribusi retribusi daerah dari sub sektor lain.
- Kontribusinya sedang jika sama dengan nilai rata-rata kontribusi retribusi daerah dari sub sektor lain.

- Kontribusinya kecil jika berada di bawah nilai rata-rata kontribusi retribusi daerah dari sub sektor lain.
- Analisa mengenai hal-hal yang mempengaruhi pencapaian jumlah retribusi akan dibahas secara deskriptif kualitatif.

Konsept Operasional

- Kontribusi adalah besarnya nilai sumbangan retribusi pada Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto yang dinyatakan dalam persen (%).
- Retribusi pada Pasar Hewan adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada pengguna/pemakai Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara atas fasilitas khusus yang disediakan Pemerintah Daerah.
- Wajib retribusi yaitu setiap ternak kuda yang terjual oleh orang pribadi atau suatu badan hukum pada Pasar Hewan Tolo'.
- Pasar Hewan adalah pasar tempat penjualan ternak kuda dimana terjadi transaksi antara pedagang dan pembeli.
- Pendapatan Asli Daerah adalah keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Letak Geografis dan Topografis

Kabupaten Jeneponto yang beribukota di Bontosunggu merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian ujung barat Propinsi Sulawesi Selatan terletak diantara $5^{\circ}16'13''$ - $5^{\circ}39'35''$ Lintang Selatan dan diantara $12^{\circ}40'19''$ - $12^{\circ}7'51''$ Bujur Timur. Menurut letak administratif batas-batas wilayah dari Kabupaten Jeneponto antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar

Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah 74.979 ha atau 749,79 km² dan secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 5 kecamatan defenitif dan 4 kecamatan perwakilan yang terdiri atas 27 kelurahan dan 84 desa. Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 1999.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Bangkala	274,78	36,68
2.	Tamalatea	145,88	19,47
3.	Binamu	123,25	16,45
4.	Batang	103,03	13,75
5.	Kelara	102,25	13,66
Jumlah		749,79	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Bangkala dengan luas 274,78 km² atau mencapai 38,68 % dari luas Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kelara dengan luas 102.25 km² atau 13, 66% dari total luas wilayah Kabupaten Jeneponto.

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, pada bagian utara terdiri atas dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian antara 500 sampai dengan 1.400 meter dpl diatas permukaan laut yang cocok untuk pengembangan hortikultura dan sayuran, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dpl, cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan, serta bagian selatan yang merupakan daerah pesisir dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 150 meter dpl, yang banyak diusahakan sebagai industri penggaraman rakyat.

Pola Pemanfaatan Tanah

Tanah di Kabupaten Jeneponto umumnya digunakan sebagai lahan pertanian baik itu tanaman pangan maupun perkebunan, selebihnya berupa tanah pekarangan, hutan, rawa, tegalan dan lain-lain, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2 :

Tabel 2. Luas Tanah di Kabupaten Jeneponto Menurut Jenis Penggunaannya, 1999.

No.	Jenis Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Pekarangan	1.320	1,76
2.	Tanah Sawah	14.725	19,64
3.	Tegala/ Kebun/Ladang	35.519	47,37
4.	Padang Rumput/ Penggembalaan	157	0,21
5.	Tidak Diusahakan Sementara	587	0,78
6.	Hutan	10.401	13,87
7.	Perkebunan	726	0,87
8.	Tambak/ Kolam/Empang	2.269	3,03
9.	Rawa-Rawa	873	1,16
10.	Lain-lain	8.402	11,21
Jumlah		74.979	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa pola penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto di dominasi oleh tanah tegalan/kebun/ladang seluas 35.519 ha atau 47,37 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jeneponto dan tanah sawah seluas 14.725 ha atau mencapai 19,64 %.

Keadaan Penduduk

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sebagai pelaksana pembangunan suatu daerah, namun hal ini dapat juga menjadi penghambat pembangunan apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki rendah.

Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk sebesar 311.129 jiwa, yang terdiri atas 150.132 jiwa laki-laki dan 160.997 jiwa perempuan dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 415 jiwa tiap km². Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto terlihat pada Tabel 3 :

Tabel 3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Tahun 1999.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	
1.	Bangkala	32.829	34.984	67.813	21,80	247
2.	Tamalatea	34.222	36.430	70.625	22,70	484
3.	Binamu	32.037	35.748	67.785	21,79	550
4.	Batang	27.758	29.402	57.160	18,37	552
5.	Kelara	23.286	24.433	47.719	15,34	467
Jumlah		150.132	160.997	311.129	100,00	415

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Tamalatea yang paling banyak diantara kecamatan lainnya yaitu sebesar 70.625 jiwa atau 22.70 % dari penduduk Kabupaten Jeneponto, dan penduduk di Kecamatan Kelara yang jumlahnya paling sedikit diantara kecamatan lain yaitu sebesar 47.719 jiwa atau sebesar 15,34% dari seluruh penduduk Kabupaten Jeneponto.

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto sebesar 415 jiwa/km², dengan nilai rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Batang sebesar 552 jiwa/ km², disusul Kecamatan Binamu sebesar 550 jiwa/ km², sedangkan rata-rata kepadatan penduduk yang paling rendah ditunjukkan oleh Kecamatan Bangkala yang hanya mencapai 247 jiwa/ km².

Mata Pencaharian

Kultur masyarakat Kabupaten Jeneponto masih bersifat agraris, oleh karena itu mata pencaharian penduduknya sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, seperti yang tampak pada Tabel 4 :

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Mata Pencaharian, 1999.

No.	Jenis Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Pertanian	66.427	40.435	106.862	71,10
2.	Pertambangan/Galian	116.109	109	225	0,15
3.	Industri	872	1.969	2.841	1,89
4.	Listrik/Gas/Air	105	0	105	0,07
5.	Konstruksi	1.969	0	1.969	1,31
6.	Perdagangan	5.450	6.664	12.114	8,06
7.	Angkutan/Komunikasi	12.775	0	12.775	8,50
8.	Keuangan	552	109	661	0,44
9.	Jasa-jasa	7.501	5.245	12.746	8,48
Jumlah		95.767	54.531	150.298	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa jenis pekerjaan yang digeluti oleh penduduk Kabupaten Jeneponto didominasi di sektor pertanian yang mencapai 71, 10% dari jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja atau sebesar 106.862 jiwa, kemudian sektor angkutan/komunikasi sebanyak 12.775 jiwa, sedangkan jenis lapangan pekerjaan yang sedikit digeluti oleh penduduk Jeneponto yaitu bidang listrik/gas/air yang hanya 105 orang atau 0,07% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Jeneponto yang bekerja.

Seperti kita ketahui bahwa mata pencaharian merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan keluarga, hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah setempat karena seperti yang tampak pada tabel meskipun kondisi daerah Kabupaten Jeneponto banyak berupa lahan kritis, namun mereka tetap menggantungkan hidup dari bertani, sedangkan yang bermata pencaharian dibidang industri sangat sedikit

2.841 jiwa atau sekitar 1,89%. Untuk itu Pemerintah perlu menggiatkan industri rumah tangga yang diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan.

Keadaan Pertanian dan Peternakan

Disektor pertanian, Kabupaten Jeneponto mampu menghasilkan beras, jagung, ubi, dan kacang-kacangan, seperti yang terlihat pada Tabel 5 :

Tabel 5. Luas Panen, dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenisnya di Kabupaten Jeneponto, 1999.

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Persentase (%)
1.	Padi Sawah	15.747	72.814,94	17,85
2.	Padi Ladang	1.234	3.746,00	0,92
3.	Jagung	39.207	128.952,93	31,60
4.	Ubi Jalar	102	6.309,12	1,55
5.	Ubi Kayu	8.709	189.016,32	46,32
6.	Kacang Tanah	359	463,40	0,11
7.	Kacang Kedele	2.639	3.399,75	0,83
8.	Kacang Hijau	3.754	3.232,19	0,79
Jumlah		71.751	408.040,65	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian yang paling banyak dihasilkan yaitu ubi kayu yang mencapai 189.016,32 ton atau sebesar 46,32% dari produksi pertanian secara keseluruhan, kemudian jagung sebesar 39, 207,93 ton atau sebesar 31, 60 %, sedangkan padi baik sawah maupun ladang hanya 76.560 ton atau hanya sekitar 18,77 % dari total produksi pertanian.

Beternak bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto lebih banyak diusahakan sebagai pekerjaan sampingan atau merupakan cabang selain pekerjaan pokok mereka sebagai petani. Untuk lebih jelasnya keadaan potensi ternak di Kabupaten Jeneponto, dapat dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Jeneponto Menurut Jenisnya, 1999.

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Persentase (%)
1.	Sapi	14.675	14,60
2.	Kerbau	14.337	14,26
3.	Kuda	14.913	14,83
4.	Kambing	55.418	55,12
5.	Domba	1.203	1,19
Jumlah		100.546	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Populasi ternak besar yang paling banyak di Kabupaten Jeneponto adalah ternak kuda sebanyak 14.913 ekor, hal ini banyak disebabkan karena kultur masyarakat Jeneponto yang lebih menyenangi ternak kuda untuk dipelihara, selain itu daging kuda merupakan konsumsi utama masyarakat dibanding dengan jenis daging ternak yang lain, hal ini tampak pada jumlah ternak yang dipotong pada Rumah Potong Hewan (RPH) dimana kuda yang dipotong sebanyak masing-masing 428 ekor, 261 ekor, dan 285 ekor pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, sebagai perbandingan sapi yang dipotong pada periode yang sama sebanyak 189 ekor, 107 ekor, 115 ekor, sedangkan kerbau yang dipotong pada periode yang sama sebanyak masing-masing 161 ekor, 95 ekor, dan 73 ekor (Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001). Sedangkan populasi ternak kecil didominasi ternak kambing sebanyak 55.418 ekor dan ternak domba hanya 1.203 ekor.

Untuk populasi ternak unggas yang ada di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 7 :

Tabel 7. Populasi Unggas di Kabupaten Jeneponto Menurut Jenisnya, 1999.

No.	Jenis Ternak Unggas	Jumlah (ekor)	Persentase (%)
1.	Ayam Ras	116.476	24,57
2.	Ayam Kampung	271.525	57,28
3.	Itik	86.036	18,15
Jumlah		474.037	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto, 2001.

Pada Tabel 7, mengenai populasi unggas diatas terlihat bahwa ayam kampung yang paling banyak dipelihara yaitu sebanyak 271.525 ekor atau sekitar 57,28% dari keseluruhan populasi unggas, disusul kemudian ayam ras sebanyak 116.476 ekor atau sekitar 24,57%. Perkembangan untuk ayam ras ini sangat pesat dimana pada tahun 1996 hanya 4.877 ekor kemudian pada tahun 1997 naik menjadi 102.870 ekor (Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto), hal ini banyak disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang membudidayakan ayam ras terutama tipe pedaging.

Pasar Hewan Kuda Tolo'

Pasar hewan adalah pasar yang menyediakan berbagai jenis ternak ruminansia (besar maupun kecil) yang masih hidup, disini para pembeli memilih hewan yang diinginkan. Dipasar ini tidak disediakan pemotongan, biasanya ternak yang dibeli untuk dipotong sendiri. Bagi pengusaha peternakan yang tidak memiliki unit pengolahan, pasar ini layak sebagai sasaran pemasaran (Rahardi dkk, 1996).

Pasar hewan sangat penting artinya bagi masyarakat untuk mempermudah memperoleh ternak baik untuk dipelihara maupun untuk dikonsumsi, selain itu dapat membantu peternak dalam memasarkan ternak hasil budidaya mereka. Pasar Hewan Kuda Tolo' berada di Kelurahan Tolo' Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu pasar hewan yang ada di Sulawesi Selatan selain Pasar Hewan

Makale yang memperdagangkan ternak babi, Pasar Hewan Rembon yang memperdagangkan ternak babi dan kerbau, serta Pasar Hewan Rantepao yang memperdagangkan babi dan kerbau (La'biran, 2000). Yang membedakan Pasar Hewan Tolo' dengan pasar hewan lainnya yaitu ternak yang diperdagangkan hanya kuda. Hal ini dimungkinkan karena Jeneponto merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki populasi ternak kuda yang cukup besar, khususnya di Kecamatan Kelara. Populasi ternak kuda di wilayah ini meningkat oleh karena daging kuda di wilayah tersebut juga merupakan makanan kegemaran bagi masyarakat Kelara. Disamping digunakan sebagai ternak kerja misalnya digunakan untuk alat transportasi (penarik bendi) dan untuk membajak sawah. Sehingga keberadaan pasar hewan kuda sangat membantu masyarakat untuk memperoleh ternak kuda.

Menurut tokoh masyarakat setempat pasar hewan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Pasar hewan ini berdampingan dengan pasar umum yang ada di Kecamatan Kelara dan menempati areal sekitar 4.000 m². Pasar Hewan Kuda Tolo' berlangsung hanya satu kali dalam seminggu yaitu pada setiap hari Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai pukul 12.00 Wita.

Oleh karena di Sulawesi Selatan ini hanya Kabupaten Jeneponto yang memiliki pasar hewan untuk kuda, maka kuda yang dipasarkan di daerah ini tidak hanya berasal dari dalam daerah itu sendiri, tetapi banyak pula yang didatangkan dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Takalar, Polmas, bahkan ada dari Manado, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Ternak kuda yang ditransaksikan pada Pasar Hewan Tolo', bukan hanya kuda lokal tetapi ada juga kuda hasil silangan dengan kuda impor. Pada hari pasar (Sabtu), jumlah kuda yang

diperdagangkan mencapai rata-rata 250 ekor dengan jumlah pedagang mencapai sekitar 150 orang.

Di dalam kompleks Pasar Hewan Tolo' terdapat bangunan milik Sub Dinas Peternakan Kabupaten Jeneponto sebagai tempat melayani pembayaran retribusi, losd penjualan, juga disediakan fasilitas tempat pemotongan ternak kuda sederhana. Selain itu Pasar Hewan Tolo' memberikan pelayanan kawin suntik (inseminasi buatan) untuk ternak sapi dan pengkartuan ternak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Responden

A. Umur Responden

Faktor umur mempengaruhi kemampuan kerja seseorang baik kemampuan fisik maupun cara berfikir. Klasifikasi umur responden sebagai pedagang ternak di Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8. Klasifikasi Umur Responden di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto, 2001.

No.	Tingkatan Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	21 - 30	4	13.33
2.	31 - 40	8	26.67
3.	41 - 50	9	30.00
4.	51 - 60	9	30.00
	Jumlah	30	100.00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2001.

Berdasarkan Tabel 8 diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden atau pedagang yang melakukan transaksi di Pasar Hewan Tolo' berada pada kelompok umur 41 - 50 tahun dengan jumlah responden 9 orang atau sekitar 30 % demikian halnya pada kelompok umur 51 - 60. tahun. Kemudian kelompok umur 31 - 40 tahun dengan jumlah 8 orang atau sekitar 26,67 % dan disusul dengan kelompok umur 21 - 30 tahun dengan jumlah 4 orang atau sekitar 13,33 % dan merupakan jumlah yang paling sedikit.

Keadaan ini menunjukkan bahwa responden rata-rata masih berusia produktif untuk melakukan aktivitas kerja khususnya dalam melakukan aktivitas sebagai pedagang ternak di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto.

B. Tingkat Pendidikan

Selain faktor umur, pendidikan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil suatu sikap atau menentukan langkah-langkah yang berhubungan dengan kegiatan usahanya termasuk keputusan untuk menjadi pedagang ternak.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah lama responden menempuh pendidikan formal. Identifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan setelah dilakukan penelitian dapat dilihat pada Tabel 9 :

Tabel 9. Identifikasi Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto, 2001.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah	2	43,33
2.	SD/Sederajat	14	26,67
3.	SMP/Sederajat	9	20,00
4.	SMU/Sederajat	5	10,00
	Jumlah	30	10,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2001.

Pada tabel 9 terlihat bahwa tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah bahkan terdapat 2 orang yang tidak mengecap pendidikan formal sama sekali. Tingkat pendidikan responden terbanyak pada tingkat SD sebanyak 14 orang atau sekitar 26,67%. Kemudian responden yang tingkat pendidikannya SMP/Sederajat sebanyak 9 orang atau sekitar 20 %. Sedangkan responden yang tingkat pendidikannya SMU/Sederajat hanya 5 orang atau sekitar 10 %. Meskipun demikian tingkat pendidikan formal tidak terlalu penting untuk menjadi pedagang ternak, yang penting adalah pengetahuan tentang berdagang ternak dan tahu seluk beluk mengenai ternak kuda itu sendiri.

C. Pengalaman Berdagang Ternak

Dari hasil wawancara dengan para pedagang yang ada di Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara diperoleh pula keterangan mengenai pengalaman (lama) mereka menjadi pedagang ternak, seperti yang nampak pada Tabel 10 :

Tabel 10. Identifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman Berdagang Ternak di Pasar Hewan Tolo' Kabupaten Jeneponto.

No	Pengalaman berdagang (tahun)	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	0 - 5	13	43,33
2.	6 - 10	8	26,67
3.	11 - 15	6	20,00
4.	16 - 20	3	10,00
Jumlah		30	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2001.

Pengalaman berdagang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan usaha menjual ternak. Karena dengan pengalaman akan menentukan kemampuan seorang pedagang untuk menjual ternak kepada pembeli terutama mengenai tawar menawar harga, bagaimana meyakinkan pembeli akan ternak yang akan dijual dan hal lainnya. Pengalaman berdagang dalam hal ini yaitu lama (waktu) seorang responden dari mulai melakukan usaha perdagangan ternak hingga saat ini yang diukur dalam satuan tahun. Semakin lama seseorang menggeluti suatu profesi, akan semakin banyak pula pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh orang tersebut (Simanjuntak, 1995).

Dari sekian banyak responden yang diambil sebagai sampel ternyata bahwa lama mereka menggeluti usaha ini bervariasi. Demikian halnya dengan pedagang tersebut, yang sebagian besar telah berdagang selama 0 - 5 tahun yaitu sebesar 43,33%,

kemudian 26,67% dengan lama berdagang 6 - 10 tahun. Yang berpengalaman selama 11 - 15 tahun sebanyak 6 orang, sedangkan 3 orang mempunyai pengalaman berdagang selama 16 - 20 tahun.

Retribusi Pasar Hewan Tolo'

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, hal ini menandai diberlakukannya otonomi daerah yang lebih luas. Maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha menggali sumber-sumber daya yang mampu dikembangkan untuk menunjang pembiayaan pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah karena setelah berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mandiri dalam bidang keuangan dan tidak bergantung pada pemerintah pusat (subsidi). Hal ini sesuai dengan pendapat Kaho (2001) yang menerangkan, bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu jenis retribusi yang diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto bersumber dari retribusi pada Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara.

Untuk menunjang kelancaran penerimaan pemerintah daerah dari retribusi Pasar Hewan Tolo', maka perlu adanya aturan yang rapi dan terarah mengenai mekanisme pemungutan retribusi pada pasar hewan ini. Pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Sub Dinas Peternakan mengangkat seorang koordinator pasar yang menangani pelaksanaan pemungutan retribusi dibantu Tripika (Petugas dari instansi Kepolisian Sektor setempat, Koramil setempat, dan Instansi Pemerintah Kecamatan Kelara) serta 2 orang pemusar.

Pemilik atau pedagang yang datang bersama ternak kudanya atau diangkut menggunakan truk masuk melalui pintu masuk yang sekaligus sebagai pintu keluar. Ternak kuda yang akan diperdagangkan bebas masuk pasar untuk diperdagangkan tanpa ada pungutan retribusi. Ternak kuda yang diperdagangkan di dalam kompleks pasar, baru dikenai retribusi setelah ternak kuda tersebut laku terjual. Hal inilah yang membedakan pemungutan retribusi antara Pasar Hewan Tolo' dengan Pasar Hewan Rantapao dimana ternak yang diperdagangkan di Pasar Hewan Rantapao ketika akan memasuki pasar diharuskan membayarkan retribusi.

Retribusi yang dikenakan pada pedagang yang ternaknya laku terjual berupa Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Yang Diperdagangkan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 20 tahun 1999, dan besar retribusi yang

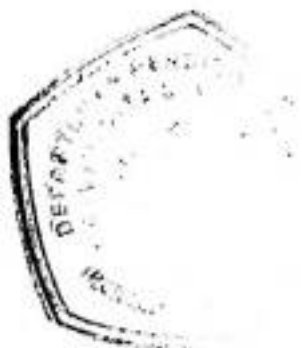
ditarik yaitu sebesar Rp. 12.500,-/ ekor. Kepada petugas retribusi diberikan insentif sebesar 5% dari retribusi penerimaan (Anonim, 1999).

Bila ditemukan pelanggaran dimana pedagang yang menjual ternaknya namun tidak melaporkan (tidak membayar retribusi) diberikan denda sebesar 2 kali lipat dari tarif retribusi yang ditetapkan.

Mekanisme pemungutan retribusi ini sebagai berikut, pada hari pasar biasanya ternak kuda yang diperdagangkan telah masuk ke pasar pada pukul 06.00, kemudian terjadi transaksi antara pedagang dan pembeli, setelah disepakati pedagang melapor ke pemusar (pencatat pasar, warna bulu, dan kesehatan kuda). Untuk petugas pemusar ini biasanya diberikan tip sebesar Rp. 1.000 - Rp. 2.000 /ekor oleh pedagang. Setelah itu hasil catatan tadi diserahkan ke koordinator pasar (pemungut retribusi) untuk ditandatangani sebagai bukti transaksi dalam bukti transaksi ini juga ditanda tangani oleh pihak Kepolisian, Koramil, Pemerintah setempat (Kecamatan Kelara), yang semuanya dilayani pada satu meja.

Uang hasil penerimaan retribusi di Pasar Hewan Tolo' diserahkan ke Bendaharawan Sub Dinas Peternakan, kemudian diserahkan ke Bendaharawan Dinas Pertanian dan Kehutanan selanjutnya disetor ke Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto untuk kemudian dicatat pada buku kas penerimaan daerah.

Pengawasan terhadap penerimaan dari retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Jeneponto yang melakukan pemeriksaan terhadap catatan petugas pemungut retribusi, buku kas bendaharawan baik di Sub Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan maupun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.



Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Hewan Tolo'

Retribusi Pasar Hewan merupakan salah satu penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jeneponto. Retibusi ini dikenakan kepada setiap ekor ternak kuda yang terjual oleh orang pribadi atau suatu badan hukum yang menjual ternak kuda di Pasar Hewan Tolo'.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto setiap tahunnya telah menargetkan jumlah penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' berdasarkan evaluasi terhadap penerimaan tahun sebelumnya maupun potensi yang ada. Akan tetapi realisasi penerimaan retribusi terkadang tidak tercapai sesuai yang diharapkan, seperti yang terlihat pada Tabel 11 :

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara Tahun 1996/1997 sampai dengan Tahun 2000.

No	Tahun	Penerimaan Retribusi Pasar Hewan Tolo' (Rp)		Persentase (Rupiah)	Keterangan
		Target	Realisasi		
1.	1996/1997	55.000.000	46.682.000	84.87	Efektif
2.	1997/1998	55.000.000	40.494.000	73.62	Belum Efektif
3.	1998/1999	60.000.000	46.893.500	78.15	Belum Efektif
4.	1999/2000	50.000.000	35.421.000	70.84	Belum Efektif
5.	2000	55.000.000	57.142.500	103.89	Efektif

Sumber : Hasil Perhitungan Data Sekunder, 2001.

Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' selama lima tahun cenderung berfluktuasi, nilainya hampir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali pada Tahun Anggaran 2000 yang mampu melewati target sebesar 3,89%.

Pada tahun 1996/1997 meskipun belum dapat memenuhi target yaitu hanya 84,87% namun penerimaan retribusi ini telah efektif. Sedangkan pada tahun anggaran

1997/1998 penerimaan retribusi ditargetkan sebesar Rp. 55.000.000,- dan yang terealisasi hanya 73,62% atau sebesar Rp. 40.494.000,- (belum efektif). Demikian pula pada tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 selain tidak memenuhi target yang dibebankan, realisasinya masing-masing hanya 78,15% dan 70,84% sehingga dapat dikatakan belum efektif. Untuk tahun anggaran 2000 yang realisasinya mencapai 103,98% atau sebesar Rp. 57.142.500,- dari Rp. 55.000.0000,- yang ditargetkan (efektif). Hal ini sesuai dengan kriteria : efektif apabila realisasi penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' mencapai 80% atau lebih dari target yang ditetapkan dan dikatakan belum efektif apabila realisasi penerimaan dari retribusi pasar hewan kurang dari 80% terhadap target yang dibebankan (Hasbullah, Sub Dinas Peternakan).

Untuk dapat mencapai realisasi penerimaan retribusi pada Pasar hewan Tolo' ditentukan oleh baik tidaknya mekanisme pemungutan retribusi terutama dalam hal pelayanan, pengawasan, dan kerja sama antara pihak pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dengan pengguna pasar hewan yang dalam hal ini pedagang.

Hal yang menjadi kelemahan utama dalam pemungutan retribusi ini adalah kurangnya pengawasan terhadap transaksi, sehingga terkadang masih banyak transaksi yang tidak dilaporkan kepada pihak pemungut retribusi sehingga penerimaan retribusi menjadi berkurang dari yang diharapkan. Keadaan ini menjadi perhatian oleh pemerintah daerah setempat dengan membangun pagar tembok permanen setinggi 2 meter pada tahun anggaran 1999/2000 disekeliling kompleks pasar, sehingga kebocoran dikarenakan adanya ternak yang keluar tidak melalui pintu yang disediakan tidak lagi terjadi karena sebelumnya hanya berupa pagar kawat berduri yang kondisinya

sudah rusak. Dengan rehabilitasi mampu meminimalkan kebocoran retribusi dan lebih memudahkan pengawasan terhadap setiap transaksi yang terjadi.

Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto

Retribusi merupakan pungutan daerah bagi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut penggolongannya retribusi ini terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Waluyo, 1997).

Retribusi yang ada pada Pasar Hewan Tolo' dapat digolongkan kedalam retribusi jasa usaha, dan untuk melihat kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jeneponto nampak pada Tabel 12 :

Tabel 12. Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 1996/1997 - Tahun 2000.

No	Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Penerimaan Retribusi Pasar Hewan Tolo' (Rp)	Kontribusi (%)
1.	1996/1997	772.204.896	46.682.000	6.05
2.	1997/1998	784.381.443	40.494.000	5.16
3.	1998/1999	457.082.525	46.893.500	10.26
4.	1999/2000	562.880.500	35.421.000	6.29
5.	2000	676.708.225	57.142.500	8.44

Sumber : Hasil Perhitungan Data Sekunder, 2001.

Pada Tabel 12 dapat dilihat mengenai sumbangan/kontribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jeneponto selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 1996/1997 sebesar 6,05%, kemudian pada tahun 1997/1998 dari total penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 84.381.443,- kontribusinya

sebesar 5,16%. Kontribusi terbesar ditunjukkan pada tahun 1998/1999 yang mencapai 10,26%. Sedangkan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 6,26% dan pada tahun anggaran 2000 sebesar 8,44%.

Retribusi Pasar Hewan Tolo' pada Tahun Anggaran 1997/1998 dari jumlah penerimaan dan kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (1996/1997) dan pada tahun 1998/1999 kontribusinya mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 5,10% dan tahun sebelumnya (1997/1998). Kemudian pada tahun 1999/2000 kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari Rp. 46.893.500,- menjadi Rp. 35.421.000,- (kontribusinya 6,92%). Dan pada tahun kelima (2000) kembali meningkat menjadi Rp. 57.142.500,-.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan mampu menunjang keuangan daerah Kabupaten Jeneponto.

Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan ini disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Retribusi pada Pasar Hewan Tolo' merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola dengan baik sehingga diharapkan mampu menunjang keuangan daerah Kabupaten Jeneponto terutama untuk pembiayaan pembangunan daerah setelah otonomi daerah diberlakukan pada tanggal 1 januari 2001.

Besarnya kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 13 :

Tabel 13. Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Tolo' dan Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah Sub Sektor Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto Tahun 1996/1997 - Tahun 2000.

No	Periode Tahun	Total PAD (Rp)	Retribusi Pasar Hewan Tolo'	Kontribusi (%)	Retribusi Sub Sektor Lain	Kontribusi (%)
1.	1996/1997	1.001.647.952	46.682.000	4,66	725.522.896	3,81
2.	1997/1998	1.021.578.149	40.494.000	3,96	743.887.443	3,64
3.	1998/1999	716.199.606	46.893.500	6,55	410.189.025	3,57
4.	1999/2000	1.298.154.971	35.421.000	2,73	527.459.500	3,38
5.	2000	1.178.083.447	57.142.500	4,85	619.565.725	4,38

Sumber : Hasil Perhitungan Data Sekunder, 2001.

Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto selama lima tahun pada tahun 1996/1997 sebesar Rp. 1.001.647.952,-, pada tahun kedua (1997/1998) mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.021.578.149,-. Namun pada tahun berikut mengalami penurunan yang cukup drastis dimana Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Jeneponto hanya sebesar Rp. 716.199.606,- kemudian pada Tahun Anggaran 1999/2000 kembali mengalami kenaikan yang cukup berarti menjadi Rp. 1.298.154.971,-. Penurunan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi lagi pada tahun anggaran 2000 menjadi Rp. 1.178.083.447,-, hal ini disebabkan pada tahun anggaran tersebut hanya berlangsung selama sembilan bulan yaitu mulai bulan April 2000 - bulan Desember 2000.

Dari Tabel diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' nilainya besar dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah sub

sektor lain, kecuali pada tahun keempat (1999/2000) yang kontribusinya hanya 2,7% terhadap total Pendapatan Asli Daerah berarti nilainya rendah karena berada dibawah rata-rata kontribusi sub sektor lain sebesar 3,38%.

Kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' yang nilainya tinggi ditunjukkan pada tahun 1996/1997 dimana kontribusinya sebesar 4,66% atau diatas rata-rata kontribusi retribusi sub sektor lain (3,81%), demikian juga pada tahun berikutnya (1997/1998) nilai rata-rata kontribusi sub sektor lain yaitu 3,64% lebih rendah dibandingkan kontribusi retribusi pasar Hewan Tolo' (3,96%). Nilai kontribusi yang tinggi ditunjukkan lagi pada tahun 1998/1999 yang mencapai 6,55%, atau lebih besar 2,94% dari rata-rata retribusi sub sektor lain, termasuk pada tahun 2000 (4,85%). Selain pencapaian nilai retribusinya melampaui target, juga lebih besar dari pada rata-rata kontribusi retribusi sub sektor lain yang hanya 4,38%.

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Nilai Pencapaian Retribusi Pasar Hewan Tolo'

Pada Tabel 11 mengenai realisasi penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' menunjukkan nilai yang berfluktuasi dan hampir tidak pernah mencapai target yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah setempat kecuali pada Tahun Anggaran 2000. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal :

a. Besar Tarif Retribusi

Besar tarif retribusi yang dipungut oleh pemerintah setempat yang masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang dapat dipungut. Retribusi yang dipungut oleh pada Tahun Anggaran 1996/1997 sampai Tahun Anggaran 1999/2000 hanya sebesar Rp. 7.500,-/ekor, hal ini berdasarkan Perda No. 7 tahun 1990, yang

telah berlaku selama 9 tahun. Sedangkan mulai pada Tahun Anggaran 2000, besar tarif retribusi ini telah diperbaharui dengan Perda No. 22 Tahun 1999 menjadi Rp. 12.500,-/ekor. Keadaan ini mampu meningkatkan penerimaan retribusi sehingga mampu melebihi target yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2000.

b. Jumlah Transaksi/ Ternak Kuda Yang Terjual

Jumlah transaksi pada tahun 1996/1997 mencapai 6.552 ekor atau senilai Rp. 46.682.000,-. Sedangkan pada tahun 1997/1998 mengalami penurunan menjadi 5.683 ekor atau Rp. 40.494.000,-, peningkatan transaksi terjadi pada tahun 1998/1999 mencapai 6.581 ekor dengan nilai Rp. 46.893.500,- untuk selanjutnya pada periode berikut (1999/2000) kembali mengalami penurunan transaksi yang cukup drastis sampai 4.971 ekor atau senilai Rp. 35.421.000,- karena adanya pencabutan Peraturan Daerah Tk. I dan II tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan Keputusan Mendagri No. 10 tahun 1998, sehingga pemungutan retribusi tidak dilakukan selama empat bulan. Sedangkan pada Tahun 2000 transaksi yang terjadi hanya 4.812 ekor karena pada tahun anggaran ini hanya berlangsung selama 9 bulan namun mampu memberikan retribusi sebesar Rp. 57.142.500,-.

c. Hari Pasar Yang Hanya Sekali Dalam Seminggu

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan hari pasar di Pasar Hewan Tolo' hanya sekali dalam seminggu (Sabtu), sementara tentu banyak konsumen yang membutuhkan ternak selain dari hari sabtu tersebut. Hal ini menyebabkan penerimaan retribusi dipasar hewan dapat saja berkurang dari potensi yang diharapkan. Keadaan ini perlu mendapat perhatian pemerintah setempat mengingat dari hasil wawancara dengan responden, diperoleh keterangan terdapat 12 pedagang atau sekitar 40% yang

menjual ternak selain hari Sabtu. Jika diasumsikan 50% dari jumlah transaksi yang terjadi bukan pada hari Sabtu atau sebanyak 13 transaksi per minggu dilakukan di pasar hewan (terjadi penambahan hari pasar) maka dalam setahun akan diperoleh tambahan retribusi sebesar Rp. 8.450.000,-. Adapun data-data mengenai hal-hal yang mempengaruhi nilai retribusi disajikan pada Tabel 15.

d. Transaksi Di Luar Pasar Hewan Tolo'

Dari keterangan responden di Pasar Hewan Tolo' juga terungkap bahwa selain penjualan kuda dipasar hewan, juga dilakukan di rumah pedagang dan kebanyakan untuk keperluan sehari-hari, keperluan pesta, dan lain-lain. Meskipun Pedagang yang menjual selain di pasar hewan hanya sekitar 40% dari keseluruhan responden, akan tetapi jumlah ternak kuda yang ditransaksikan dalam seminggu dari keduabelas pedagang ini rata-rata mencapai 27 ekor, transaksi ini cukup banyak dan apabila terjadi di pasar hewan, akan memberikan retribusi yang cukup besar.

e. Adanya Transaksi Yang Tidak Terlapor Pada Pasar Hewan Tolo'

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan terhadap setiap transaksi menjadi kelemahan utama dalam pemungutan retribusi di Pasar Hewan Tolo', meskipun petugas pemungut retribusi (koordinator pasar) dibantu oleh Tripika Kecamatan Kelara. Kondisi ini diperparah oleh karena pagar kawat berduri yang mengelilingi kompleks pasar hewan telah banyak rusak (putus), yang memungkinkan ternak kuda keluar tidak melalui pintu yang disediakan, sehingga kebocoran retribusi tidak dapat dihindarkan. Hal ini telah mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat dengan membangun pagar tembok permanen setinggi 2 meter pada Tahun Anggaran 1999/2000, sehingga kebocoran penerimaan

retribusi dapat diminimalkan, akan tetapi masih sering terdapat transaksi yang tidak dilaporkan diakibatkan pengawasan di pintu pasar hewan hanya kadang-kadang dilakukan. Selain itu hal yang menyebabkan pedagang enggan membayar retribusi disebabkan oleh tingginya pungutan selain dari tarif resmi retribusi itu sendiri (Rp. 12.500), hal ini dapat dilihat pada Tabel 14 dimana dari 30 responden, terdapat 26 responden atau sekitar 86,7% mengungkapkan pungutan yang dibayar besar, dengan jumlah yang dibayarkan apabila ternak laku terjual sebesar Rp. 20.500,- bahkan kadang-kadang lebih.

Tabel 14. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Nilai Pencapaian Retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara, 2001.

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Rata-rata Kuda Yang Terjual Setiap Minggu :		
	- 1 Ekor	5	16,7
	- 2 Ekor	4	13,3
	- 3 Ekor	5	16,7
	- 4 Ekor	3	10
	- 5 Ekor	6	20
	- 6 Ekor	4	13,3
	- 7 Ekor	3	10
2.	Pedagang yang menjual selain hari pasar (Sabtu) :		
	- Menjual hanya pada hari pasar (Sabtu)	18	60
	- Menjual selain hari pasar (Sabtu)	12	40
3.	Transaksi yang dilakukan :		
	- Hanya pada Pasar Hewan Tolo'	18	60
	- Selain Pasar Hewan Tolo' (Rata-rata penjualan/minggu 27 Ekor)	12	40
4.	Alasan menjual dipasar :		
	- Banyak Pembeli	24	80
	- Tempat penjualan	3	10
	- Cepat laku	3	10
5.	Membayar retribusi jika ternak kuda laku terjual :		
	- Ya	30	100
	- Tidak	0	0
6.	Tarif retribusi dikenakan :		
	- Besar	26	86,7
	- Tidak	4	13,3
7.	Jumlah yang dibayar jika ternak laku :		
	- Rp. 20.500,-	30	100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah, 2001.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' selama lima tahun terakhir berfluktuasi dan berdasarkan rata-rata (mean) penerimaan retribusi tersebut efektif (82,27%).
- Kontribusi retribusi Pasar Hewan Tolo' terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto selama lima tahun terakhir relatif besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi retribusi sub sektor lain.
- Hal-hal yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Hewan Tolo' Kecamatan Kelara yaitu besar tarif retribusi yang dipungut, jumlah transaksi/ternak kuda yang terjual, hari pasar yang hanya sekali dalam seminggu, adanya transaksi selain di pasar hewan, dan adanya transaksi yang tidak dilaporkan.

Saran

- Banyaknya pungutan selain retribusi yang seharusnya dikenakan pada pedagang ternak, hendaknya menjadi perhatian pemerintah setempat mengingat pungutan-pungutan itu sangat memberatkan bagi pedagang terutama pedagang kecil maupun peternak yang menjual ternaknya di Pasar Hewan Tolo'.
- Bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat meneliti di Pasar Hewan Tolo', disarankan untuk meneliti mengenai analisa investasi pasar hewan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1993. *Buku Pintar Penyuluhan Peternakan Untuk PPS-PPL dan Staf Penyuluhan*. Departemen pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Bina Penyuluhan, Jakarta.
- Anonim, 2000. *Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Daerah dan Pusat, dan Undang-Undang No.28 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari KKN*. Biro Bina Otonomi, Sekwilda Prop. Sul-Sel, Makassar.
- Arisman, dkk, 1982. *Peternakan, Pendidikan dan keterampilan SMTA*. Angkasa, Bandung.
- Davey, K.J, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press, Jakarta.
- Devas, N. dkk, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- Hanafiah, A.M. dan A.M. Saefuddin, 1986. *Tata Niaga Hasil Perikanan*. UI Press, Jakarta.
- Hardjosworo, P.S. dan J. Levine, 1987. *Pengembangan Peternakan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kaho, Y.R, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- La'biran, M. 2000. *Kontribusi Retribusi Pasar Hewan Rantepao Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Tana Toraja*. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unhas, Makassar.
- Lains, A, 1985. *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, dalam Prisma No. 4*, Jakarta.
- Rahardi, dkk, 1996. *Agribisnis Peternakan*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rasyaf, M, 1994. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1996. *Memasarkan Hasil Peternakan*. Penebar Swadaya, Jakarta.

- _____, 1997. *Manajemen Peternakan Ayam Petelur*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Salamun, 1994. *Pajak, Citra, dan Upaya Pembaharuannya*. PT Bina Reka Pariwara, Jakarta.
- Simanjuntak, P.T. 1995. *Pengantar Sumber Daya Manusia*. Penerbit LPFE-UI, Jakarta.
- Soedargo, 1994. *Perpajakan dan Retribusi Daerah*. Penerbit NU Eresco, Bandung.
- Soenarjo, C. H, 1988. *Buku Pegangan Kuliah Ilmu Tilik Ternak*. CV. Baru, Jakarta.
- Stanton, W.J, 1997. *Prinsip Pemasaran*. Erlangga, Jakarta.
- Supranto, J. 1983. *Ekonometrika*. LPUI, Jakarta.
- Supriatna, T, 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutawi, M, 2000. *Era Otoda Nasib Peternak(an) Bagaimana ?*. dalam Poultry Indonesia No. 247, Jakarta.
- Swastha, B. dan I, Soekotjo, 1988. *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*. Liberty, Yogyakarta.
- Usman, A. Y, 1998. *Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Daerah Tingkat II Bone*. Fapet-UH, Ujung Pandang.
- Waluyo, 1997. *Ketentuan Undang-Undang Baru di Bidang perpajakan*. LPFE UI, Jakarta.
- Widjaja, A.W, 1998. *Titik Berat Otonomi*. PT Rajagrafindo Persada